



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2010



**LAPORAN REALISASI KEUANGAN (LRA),
NERACA, LAPORAN OPERASIONAL,
LAPORAN EQUITAS, DAN CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN (CALK)**

TAHUN ANGGARAN 2021

SIMDA KEUANGAN

Copyright © 2004 - 2008 by BPKP

Ver. 2.1

**DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI**

Jln. Pekan Baru no 55, Transito
Kec. Alam Barajo, Jambi

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelola keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan membuat laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2021 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan berbasis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel sebagai bahan pengambil kebijakan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi.

Jambi, Januari 2022

Kepala Dinas,



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	II
DAFTAR ISI.....	III
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	V
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN.....	6
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	8
II. NERACA.....	9
III. LAPORAN OPERASIONAL.....	10
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	11
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	12
A. PENJELASAN UMUM.....	12
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	244
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA.....	26
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAINNYA.....	32
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	33



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Pekan Baru No. 55 Telp. (0741) 62295 , Fax. (0741) 61545

PERNYATAANTANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Tahun 2021 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jambi, Januari 2022

Kepala Dinas,



BAHARI, SH. MSi

Pembina Utama Muda

Nip. 196404171992031010

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahun 2021 Unaudite Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021. Realisasi Pendapatan Daerah pada TA 2021 berasal dari Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA Kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing sebesar Rp.34.715.760,-

Realisasi Belanja TA 2021 adalah sebesar Rp.26.895.102.543 atau mencapai 93,46 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.28.778.090.178

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2021. Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp.11.728.903.569,58 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp.2.696.000,-; Piutang Jangka Panjang (netto) sebesar Rp.0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.11.726.207,569,58; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.0;

dan jumlah Ekuitas sebesar Rp.11.728.903.569,58

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.37.715.760 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional

terdiri dari beban pegawai sebesar Rp.17.585.360.494, beban barang dan jasa sebesar Rp.8.171.761.955, beban lain-lain Rp.52.694.133,-, beban penyusutan peralatan dan mesin Rp.535.324.516,81, beban penyusutan gedung dan bangunan Rp.1.348.857.149,62,-, beban penyusutan jalan, jaringan dan irigasi Rp.300.000,- sehingga dapat defisit dari kegiatan Operasional senilai Rp.28.547.064.488,43.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 adalah sebesar Rp.5.107.267.486,12. dikurangi Defisit-LO sebesar Rp.28.547.064.488,43,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp.11.694.334.010,58

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2021 disusun dan disajikan berbasis akrual.

I.LAPORAN REALISASI ANGGARAN

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAMBI LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 dan 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2021		% thd Angg	TA 2020
	ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN	131.250.000	34.715.760		
Penerimaan Retribusi Daerah	131.250.000	34.715.760	26,45	-
JUMLAH PENDAPATAN	131.250.000	34.715.760	26,45	-
				0,00
BELANJA	28.778.090.178	26.895.102.543	93,46	22.069.101.988
Belanja Operasi	28.384.097.772	26.528.672.111	93,46	21.896.731.988
Belanja Pegawai	18.960.214.556	17.585.360.494	92,75	17.520.164.825
Belanja Barang dan Jasa	8.536.401.216	8.055.829.617	94,37	4.376.567.163
Belanja Sosial	887.482.000	887.482.000	100,00	
Belanja Modal	393.992.406	366.430.432	93,00	172.370.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	302.137.566	281.713.020	93,24	172.370.000
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	91.854.840	84.717.412	92,23	
SURPLUS / (DEFISIT)				0,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	28.646.840.178	26.860.386.783	93,76	22.069.101.988

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAMBI NERACA

PER 31 DESEMBER 2021 dan 31 DESEMBER 2020 (Dalam Rupiah)

URAIAN	2021	2020
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas lainnya dan setara Kas	-	-
Piutang Bukan Pajak	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
Penyisihan Utan Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	-	-
Beban Dibayar Dimuka	-	-
Pendapatan yang Masih Harus di Terima	-	-
Persediaan	2.696.000	2.124.600
JUMLAH ASET LANCAR	2.696.000	2.124.600
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Non Permanen	-	-
Investasi Permanen	-	-
Penyisihan Piutang dana bergulir dari investasi non permanen	-	-
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	-	-
ASET TETAP		
Tanah	-	-
Peralatan dan Mesin	10.962.440.435,60	10.733.421.548,60
Gedung dan Bangunan	14.993.005.947,89	6.719.261.718
Jalan, Jaringan dan Irigasi	15.000.000	15.000.000
Aset Tetap Lainnya	260.507.000	260.507.000
Konstruksi dalam pengerjaan	-	-
Akumulasi Penyusutan	(14.504.745.813,91)	(12.620.264.147,48)
Jumlah Aset Tetap	11.726.207.569,58	5.107.926.119,12
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	-	-
Aset Tidak Berwujud	-	-
Aset Lain-Lain	3.231.344.404,90	3.231.344.404,90
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(3.231.344.404,90)	(3.231.344.404,90)
JUMLAH ASET	-	-
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
Utang Bunga	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	-	-
Utang Belanja	34.569.599	2.783.233
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN	34.569.599	2.783.233
EKUITAS		
Ekuitas	11.694.334.010,58	5.107.267.486,12
JUMLAH EKUITAS	11.694.334.010,58	5.107.267.486,12
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	11.728.903.609,58	5.110.050.719,12

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III.LAPORAN OPERASIONAL
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAMBI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 dan
31 DESEMBER 2020 (Dalam Rupiah)

URAIAN	2021	2020
KEGIATAN OPERASIONAL		
PENDAPATAN - LO		
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	34.715.760	-
Pendapatan Retribusi Daerah	34.715.760	-
Pendapatan Hibah-LO	-	-
JUMLAH PENDAPATAN	34.715.760	-
BEBAN		
Beban Pegawai	17.585.360.494	17.520.164.825
Beban Persediaan	-	-
Beban Barang dan Jasa	8.171.761.955	4.358.399.154
Beban Bunga	-	-
Beban Subsidi	-	-
Beban Hibah	-	-
Beban Bantuan Sosial	887.482.000	-
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	535.324.516,81	3.758.672.747,29
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.348.857.149,62	196.507.096,80
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	300.000	300.000
Beban Lain-lain	52.694.133	80.400.000
JUMLAH BEBAN	28.581.780.248,43	25.914.443.822,92
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(28.547.064.488,43)	(25.914.443.822,92)
KEGIATAN NON OPERASIONAL		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar	-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	-	-
Defisit Selisih Kurs	-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(28.547.064.488,43)	(25.914.443.822,92)
POS LUAR BIASA		
Pendapatan PNBPN	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-
Beban Persediaan	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO	(28.547.064.488,43)	(25.914.443.822,92)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV.LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAMBI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 dan
31 DESEMBER 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2021	2020
EKUITAS AWAL	5.107.267.486,12	-
SURPLUS/DEFISIT LO	(28.547.064.488,43)	(25.914.443.822,92)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN	-	-
Koreksi Ekuitas	8.273.744.229,89	-
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	26.860.386.783	-
EKUITAS AKHIR	11.694.334.010	(55.777.857.460)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V.CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi

Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi Merupakan Rumusan secara garis besar mengenai cara dan upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh SKPD beserta Perangkatnya untuk mewujudkan Visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi. 1. Meningkatkan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja 2. Mendorong Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja. 3. Mendorong Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja untuk Menciptakan Kondisi Kerja yang Kondusif. 4. Mendorong Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sebagai salah satu SKPD yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan 2 (dua) urusan, yaitu urusan wajib non pelayanan dasar bidang Ketenagakerjaan serta urusan pilihan bidang ketransmigrasian, telah menyusun tahapan-tahapan implementasi perencanaan melalui program dan kegiatan sebagai bentuk dukungan tujuan, sasaran dan Visi dan Misi organisai.

Dalam pengelolaan anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi tidak terlepas dari Neraca Pembangunan Provinsi Jambi, dimana Kepala Dinas sesuai dengan Tupoksinya bertindak sebagai Penggunaan Anggaran.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Pemerintah Daerah Provinsi Jambi.

SIMDA dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

A.3. Basis Akuntansi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Provinsi Jambi. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Daerah.
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasikan, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi adalah Pendapatan Retribusi Daerah;
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan

berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUD.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh BAKEUDA Provinsi Jambi.
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

- **Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau kurang dari Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau kurang dari Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI

ANGGARAN

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.34.715.760 atau mencapai 26,45 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.131.250.000. Pendapatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi berasal dari Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA Kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing. Menurunnya target penerimaan Daerah dari Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA Kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing karena kebijakan pemerintah Membatasi Tenaga Kerja Asing serta Mengurangi TKA di Perusahaan.

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada TA 2021 adalah sebesar Rp.28.6860.386.783 atau 93,76 persen dari anggaran belanja sebesar Rp.28.646.840.178 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2021

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	18.960.214.556	17.585.360.494	92,75
Belanja Barang dan jasa	8.536.401.216	8.055.829.617	94,37
Belanja Bantuan Sosial	887.482.000	887.482.000	100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	302.137.566	281.713.020	93,24
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	91.854.840	84.717.412	92,23
Total Belanja Kotor	28.646.840.178	26.860.386.783	93,76
Pengembalian			-
Jumlah	28.646.840.178	26.860.386.783	93,76

B.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2021 adalah sebesar Rp.366.430.432 Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

B.3.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan mesin TA 2021 adalah Rp.281.713.020 untuk pembelian barang berupa Laptop 2 unit, komputer 8 unit, printer 6 unit, kursi kerja putar 11 unit, meja kursi ½ biro 12 unit, ac split 1 pk 5 unit, whiteboard 1 set, ac 1 unit, kursi roda 1 unit, kursi lipat 1 unit, kursi pejabat 1 unit, kursi tunggu tamu 1 unit, baju olahraga 100 Set, kabel 1 set, apron 16 set, helm pengelasan 32 buah, kaca mata 50 buah, sarung tangan 32 buah, kaca mata konstruksi 25 buah, apron leather 16 buah, blush on 27 buah, exclusive mate lip cream 27 buah, eye brown brown 27 buah, eye shadow 27 buah, face powder 27 buah, liquid foundation 27 buah, mascara 27 buah, optimum hi back linear 27 buah, two way cake 27 buah.

B.3.2 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Realisasi Belanja Modal Aset tetap lainnya TA 2021 adalah Rp.84.717.412,- digunakan untuk pembayaran wifi dinas

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 adalah kas tunai sebesar Rp. 0. dan direkening Bank Jambi Rp. 0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.0 Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya Pendapatan Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA Kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing terdapat Anggaran estimasi penerimaan sebesar Rp.131.250.000, yang terealisasi sebesar Rp.34.715.760

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2021 dan 2020

Keterangan	TH 2021	TH 2020
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan	-	-
Jumlah	-	-

4 Piutang PNB

Saldo Piutang PNB per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNB disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNBP TA 2021 dan 2020

Uraian	TH 2021	TH 2020
Piutang PNBP	-	-
Piutang Lainnya	-	-

5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.450.570.753 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2021 dan 2020

Jenis	TH 2021	
Alat Tulis Kantor	397.407.937	
Bahan Kebersihan	-	
Bahan Kimia	-	
Pupuk	-	
Alat Listrik	53.162.816	
Aset yang akan diserahkan pada pihak ketiga		
Jumlah	450.570.753	

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang terdiri dari :

1. Alat Tulis kantor Rp 397.407.937
2. Bahan Kebersihan Rp.0.-

3. Alat Listrik Rp. 53.162.816

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.0,-

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 10.962.440.435,60 dan Rp. 10.733.421.548,- terjadi peningkatan pada saldo aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp.229.018.887,-.

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai aset tetap berupa gedung dan bangunan yang dimiliki Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.14.993.005.947,89 Gedung dan Bangunan dicatat pada buku Inventaris Barang Tersendiri.

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Nilai aset tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi per 31 Desember 2021 sebesar Rp.15.000.000,- Jalan, Irigasi dan Jaringan dicatat pada Buku Inventaris Barang tersendiri.

C.18 Aset Tetap Lainnya

Nilai aset tetap berupa Aset tetap lainnya yang dimiliki Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 260.507.000 aset tetap lainnya dicatat pada Buku Inventaris Barang tersendiri.

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Nilai konstruksi dalam pengerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi Rp.0,-

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdapat Saldo Akumulasi. Penyusutan aset tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp.(14.504.745.813,19.)

C.21 Aset Tak Berwujud

Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi tidak mempunyai aset tak berwujud sehingga tidak terdapat Saldo Aset tak berwujud per 31 Desember 2021.

C.22 Aset Lain-Lain

Nilai Aset lain-lain per 31 Desember 2021 sebesar Rp.0,-.

C.24 Hutang Kepada Pihak Ketiga

Nilai utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2021 sebesar Rp.0. utang kepada pihak ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) sejak tanggal pelaporan.

C.25 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2021 Rp.0 Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.0 Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2021 sebesar Rp.0 merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang dananya tidak mencukupi pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 11.694.334.010,58 dan Rp. 25.914.443.822,92 Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Retribusi Daerah

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.34.715.760.

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2021 sebesar Rp.17.585.360.494 Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan

atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.

D.3 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa tahun 2021 adalah sebesar Rp.8.171.761.955

D.4 Beban Bantuan Sosial

Jumlah Beban Bantuan Sosial untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp.887.482.000

D.4 Beban Lain-lain

Jumlah Beban Lain-lain untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp.52.694.133

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 5.107.267.486,12

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. (28.547.064.488,43). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Tetap

Nilai koreksi ekuitas penyesuaian aset tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.0.

E.4 Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai koreksi ekuitas penyusutan aset tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.0

E.5 Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Lainnya

Nilai koreksi ekuitas penyesuaian aset lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.0

E.6 Koreksi Ekuitas Perhitungan Mutasi Masuk dan Keluar Aset Tetap

Nilai koreksi ekuitas perhitungan mutasi masuk dan keluar aset tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.0 koreksi ekuitas perhitungan mutasi masuk dan keluar aset tetap merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

PENGGUNA ANGGARAN

BAHARI, SH, M.Si
Pembina Utama Muda /IV.c
NIP.19640417 199203 1 010